

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelolaan keuangan daerah merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Pelaksanaan desentralisasi fiskal memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangannya guna meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta pemerataan pembangunan antar daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kapasitas fiskal daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.(Christia & Budi Ispriyarso, 2019)

Di sisi lain, peningkatan kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik menyebabkan belanja daerah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pengelolaan belanja daerah yang kurang efektif dapat menyebabkan terjadinya tekanan fiskal apabila pertumbuhan belanja lebih besar dibandingkan kemampuan pendapatan daerah. Kondisi tersebut dapat berdampak pada munculnya defisit anggaran yang pada akhirnya mengganggu keberlanjutan fiskal daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengelola pengeluaran daerah secara efisien dan tepat sasaran guna menjaga stabilitas fiskal daerah.(Patiroi, 2018)

Ketidakseimbangan fiskal merupakan kondisi ketika kemampuan keuangan daerah tidak mampu mengimbangi kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terganggunya pelaksanaan pembangunan daerah, menurunnya kualitas pelayanan publik, serta mempersempit ruang fiskal pemerintah daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Semakin tinggi ketergantungan terhadap transfer antar pemerintah, maka semakin besar pula potensi terjadinya ketidakseimbangan fiskal pada pemerintah daerah. Ketidakseimbangan fiskal yang terjadi secara terus-menerus dapat menghambat pertumbuhan ekonomi daerah dan mengurangi efektivitas pelaksanaan otonomi daerah.(Handraini et al., 2024)

Kota Cirebon sebagai salah satu daerah otonom di Provinsi Jawa Barat memiliki peranan penting sebagai pusat perdagangan, jasa, dan pariwisata. Potensi ekonomi yang dimiliki Kota Cirebon seharusnya mampu mendukung peningkatan kapasitas fiskal daerah. Namun demikian, dalam pengelolaan keuangan daerahnya, Kota Cirebon masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan tersebut adalah tingginya ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam membiayai berbagai kebutuhan daerah. Selain itu, peningkatan kebutuhan belanja daerah dari tahun ke tahun juga memberikan tekanan terhadap kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan fiskal. (Rachman & Ningrum, 2025)

Berdasarkan data realisasi APBD Kota Cirebon tahun 2012–2023, kondisi keuangan daerah menunjukkan adanya fluktuasi antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Pada periode 2012–2015 Kota Cirebon mengalami surplus anggaran. Namun, pada tahun 2016 hingga tahun 2019 Kota Cirebon mengalami defisit anggaran secara berturut-turut. Defisit terbesar terjadi pada tahun 2016 sebesar Rp89,81 miliar, sedangkan pada tahun 2019 mencapai Rp44,26 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan belanja daerah tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah secara seimbang sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan fiskal.

Tabel 1. 1 Kondisi Surplus Defisit APBD Kota Cirebon Tahun 2012-2023

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah-Belanja Daerah	Ket.
2012	872.125.300.174	813.671.539.785	58.453.760.389	Surplus
2013	1.009.950.399.239	975.249.676.763	34.700.722.476	Surplus
2014	1.234.067.584.543	1.194.448.621.957	39.618.962.586	Surplus
2015	1.403.866.685.439	1.354.729.318.775	49.137.366.664	Surplus
2016	1.373.624.806.723	1.463.440.701.758	-89.815.895.035	Defisit
2017	1.390.133.637.913	1.409.419.587.356	-19.285.949.443	Defisit
2018	1.422.978.064.983	1.426.054.577.183	-3.076.512.200	Defisit
2019	1.543.026.589.244	1.587.295.590.992	-44.269.001.748	Defisit
2020	1.633.922.078.236	1.582.881.804.426	51.040.273.810	Surplus

Tahun	Pendapatan Daerah	Belanja Daerah	Pendapatan Daerah-Belanja Daerah	Ket.
2021	1.346.961.959.551	1.334.562.609.268	12.399.350.283	Surplus
2022	1.477.506.731.354	1.433.814.101.322	43.692.630.032	Surplus
2023	1.457.195.241.975	1.444.792.084.073	12.403.157.902	Surplus

Sumber ; DJPK Kemenkeu, co.id

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat diketahui bahwa kondisi APBD Kota Cirebon mengalami fluktuasi selama periode penelitian. Adanya defisit anggaran selama empat tahun berturut-turut pada tahun 2016–2019 menunjukkan bahwa pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan daerah. Meskipun pada tahun 2020–2023 kondisi APBD kembali mengalami surplus, namun besaran surplus yang diperoleh cenderung berfluktuasi sehingga menunjukkan bahwa kondisi fiskal daerah belum sepenuhnya stabil. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah masih menghadapi berbagai tantangan.

Selain kondisi APBD yang berfluktuasi, dana transfer yang diterima Kota Cirebon juga menunjukkan nilai yang relatif besar setiap tahunnya. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah daerah masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat dalam membiayai berbagai kebutuhan daerah.

Tabel 1. 2 Perkembangan Dana Transfer Pusat Kota Cirebon Tahun 2012-2023

Tahun	DBH	DAU	DAK	Total Dana Transfer Pusat
2012	81.530.342.492	551.307.701.000	20.172.180.000	653.010.223.492
2013	64.517.532.233	536.884.996.000	28.845.610.000	630.248.138.233
2014	73.175.370.689	583.927.691.000	32.145.380.000	689.248.441.689
2015	53.649.789.766	577.764.436.000	141.699.660.000	773.113.885.766
2016	75.809.242.483	588.109.947.000	206.918.604.124	870.837.793.607
2017	79.625.947.072	577.778.746.000	161.933.473.759	819.338.166.831
2018	71.877.328.085	577.778.746.000	164.489.195.433	814.145.269.518
2019	57.473.349.170	593.145.833.000	152.968.499.176	803.587.681.346
2020	89.440.938.804	545.286.189.000	182.779.217.048	817.506.344.852
2021	-	-	-	781.480.595.484
2022	-	-	-	816.615.404.248

Tahun	DBH	DAU	DAK	Total Dana Transfer Pusat
2023	-	-	-	807.444.153.338

Sumber ; DJPK Kemenkeu, co.id

Catatan : Pada tahun 2021–2023, data Dana Transfer Pusat pada sumber DJPK Kementerian Keuangan tidak disajikan secara rinci (DBH, DAU, DAK), melainkan langsung dalam bentuk Total Dana Transfer Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai total tersebut sesuai data resmi DJPK Kementerian Keuangan.

Berdasarkan Tabel 1.2, total dana transfer pusat Kota Cirebon selama periode 2012–2023 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Pada tahun 2012, total dana transfer pusat tercatat sebesar Rp653,01 miliar dan mengalami peningkatan menjadi Rp870,84 miliar pada tahun 2016. Namun, pada periode selanjutnya total dana transfer pusat mengalami fluktuasi dengan nilai sebesar Rp819,34 miliar pada tahun 2017, Rp814,15 miliar pada tahun 2018, Rp803,59 miliar pada tahun 2019, dan Rp817,51 miliar pada tahun 2020. Sementara itu, pada tahun 2021 hingga 2023 total dana transfer pusat masing-masing sebesar Rp781,48 miliar, Rp816,62 miliar, dan Rp807,44 miliar. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan dana transfer pusat yang diterima Pemerintah Kota Cirebon cenderung mengalami perubahan dari tahun ke tahun.

Besarnya dana transfer pusat yang diterima menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan publik. Dana transfer pusat menjadi salah satu sumber pendapatan utama yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal serta mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah. Namun, ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer pusat dapat menjadi permasalahan apabila terjadi perubahan kebijakan fiskal maupun penurunan alokasi transfer dari pemerintah pusat, sehingga berpotensi memengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya.

Selain itu, fluktuasi dana transfer pusat yang terjadi dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah pusat. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kemandirian fiskal Kota Cirebon masih relatif terbatas karena sebagian besar pembiayaan daerah masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Apabila penerimaan dana transfer mengalami penurunan sementara kebutuhan belanja daerah terus meningkat, maka kondisi tersebut dapat menimbulkan tekanan terhadap keuangan daerah dan berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan fiskal.

Di sisi lain, belanja daerah Kota Cirebon juga menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat selama periode penelitian. Pada tahun 2012, belanja daerah tercatat sebesar Rp813,67 miliar dan meningkat menjadi Rp1,44 triliun pada tahun 2023. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peningkatan belanja daerah yang terus terjadi tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah yang seimbang. Kondisi tersebut tercermin dari terjadinya defisit anggaran secara berturut-turut pada tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada periode tersebut, kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah lebih besar dibandingkan kemampuan penerimaan daerah, sehingga memberikan tekanan terhadap kondisi fiskal Kota Cirebon. Apabila peningkatan belanja daerah tidak diimbangi dengan kemampuan pendapatan yang memadai, maka kondisi tersebut dapat memperbesar risiko terjadinya ketidakseimbangan fiskal dan menghambat keberlanjutan pembangunan daerah.

Fenomena tingginya ketergantungan terhadap dana transfer pusat serta meningkatnya kebutuhan belanja daerah menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kota Cirebon masih menghadapi berbagai tantangan. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan fiskal yang lebih efektif dan berkelanjutan agar pemerintah daerah mampu menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah. Dengan demikian, dana transfer

pusat dan belanja daerah menjadi faktor yang penting untuk dikaji lebih lanjut dalam hubungannya dengan kondisi ketidakseimbangan fiskal Kota Cirebon selama periode 2012–2023.

Tabel 1. 3 Perkembangan Dana Transfer Provinsi Koota Cirebon Tahun 2012-2023

Tahun	Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi	Bantuan Keuangan Provinsi	Total Dana Transfer Provinsi
2012	44.274.870.562	-	44.274.870.562
2013	54.795.842.750	30.602.131.530	85.397.974.280
2014	68.713.649.351	-	68.713.649.351
2015	73.160.241.641	-	73.160.241.641
2016	73.526.744.624	23.459.034.208	96.985.778.832
2017	80.823.495.348	-	80.823.495.348
2018	89.899.372.419	-	89.899.372.419
2019	96.108.159.099	-	96.108.159.099
2020	81.172.515.237	209.992.429.660	291.164.944.897
2021	122.470.262.788	-	122.470.262.788
2022	119.208.746.024	-	119.208.746.024
2023	114.967.238.153	-	114.967.238.153

Sumber ; DJPK Kemenkeu, co.id

Berdasarkan Tabel 1.2, dana transfer provinsi yang diterima Pemerintah Kota Cirebon selama periode 2012–2023 menunjukkan kondisi yang berfluktuasi. Dana transfer provinsi tersebut terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi dan Bantuan Keuangan Provinsi yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2012 total dana transfer provinsi tercatat sebesar Rp44,27 miliar dan mengalami peningkatan menjadi Rp96,98 miliar pada tahun 2016. Selanjutnya, total dana transfer provinsi terus mengalami perubahan dengan nilai sebesar Rp80,82 miliar pada tahun 2017, Rp89,89 miliar pada tahun 2018, dan Rp96,10 miliar pada tahun 2019. Peningkatan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020, yaitu mencapai Rp291,16 miliar akibat adanya tambahan Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp209,99 miliar. Sementara itu, pada tahun 2021 hingga 2023 total dana transfer provinsi masing-masing sebesar Rp122,47 miliar, Rp119,21 miliar, dan Rp114,97 miliar.

Fluktuasi dana transfer provinsi tersebut menunjukkan bahwa kontribusi pemerintah provinsi memiliki peranan penting dalam mendukung kemampuan keuangan Pemerintah Kota Cirebon. Dana transfer provinsi digunakan untuk membantu pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Namun, besarnya dana transfer provinsi yang diterima setiap tahunnya tidak bersifat tetap dan sangat dipengaruhi oleh kebijakan fiskal Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kondisi tersebut menyebabkan kemampuan fiskal daerah juga dipengaruhi oleh besarnya transfer yang diberikan oleh pemerintah provinsi.

Selain itu, ketergantungan terhadap dana transfer provinsi dapat menjadi salah satu tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah. Apabila terjadi penurunan alokasi transfer atau perubahan kebijakan dari pemerintah provinsi, maka kondisi tersebut berpotensi memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan belanja dan menjaga keseimbangan fiskal daerah. Oleh karena itu, dana transfer provinsi memiliki peranan yang penting dalam mendukung stabilitas fiskal daerah serta menjadi salah satu faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dengan demikian, fluktuasi dana transfer provinsi yang terjadi selama periode penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Cirebon masih memperoleh dukungan pembiayaan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam melaksanakan pembangunan daerah. Namun, tingginya ketergantungan terhadap transfer antar pemerintah tersebut juga menunjukkan bahwa kemampuan fiskal daerah masih sangat dipengaruhi oleh sumber penerimaan dari luar daerah, sehingga berpotensi memengaruhi kondisi ketidakseimbangan fiskal apabila tidak diimbangi dengan peningkatan kapasitas fiskal daerah secara mandiri.

Tabel 1 4 Perkebangan Belanja Daerah Kota Cirebon Tahun 2012-2023

Tahun	Total Belanja Daerah
2012	813.671.539.785
2013	975.249.676.763
2014	1.194.448.621.957
2015	1.354.729.318.775
2016	1.463.440.701.758
2017	1.409.419.587.356
2018	1.426.054.577.183
2019	1.587.295.590.992
2020	1.582.881.804.426
2021	1.334.562.609.268
2022	1.433.814.101.322
2023	1.444.792.084.073

Sumber ; DJPK Kemenkeu, co.id

Berdasarkan Tabel 1.3, belanja daerah Kota Cirebon selama periode 2012–2023 terdiri atas beberapa komponen, yaitu belanja tidak langsung, belanja hibah, belanja subsidi, belanja bunga, belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, belanja tidak terduga, serta belanja bantuan sosial. Komponen belanja tersebut digunakan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan daerah, serta penyediaan pelayanan kepada masyarakat. Selama periode penelitian, komponen belanja yang memiliki kontribusi terbesar terhadap total belanja daerah adalah belanja tidak langsung, belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai.

Pada tahun 2012, total belanja daerah Kota Cirebon tercatat sebesar Rp813,67 miliar yang sebagian besar berasal dari belanja tidak langsung sebesar Rp537,30 miliar, belanja modal sebesar Rp93,93 miliar, dan belanja barang dan jasa sebesar Rp182,44 miliar. Seiring meningkatnya kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik, total belanja daerah terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp1,46 triliun pada tahun 2016. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya belanja modal, belanja barang dan

jasa, serta belanja pegawai yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan program pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada tahun 2017 hingga 2020, total belanja daerah mengalami fluktuasi dengan nilai masing-masing sebesar Rp1,41 triliun, Rp1,43 triliun, Rp1,59 triliun, dan Rp1,58 triliun. Sementara itu, pada periode 2021–2023 struktur belanja daerah mengalami perubahan seiring dengan penerapan klasifikasi belanja berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada periode tersebut, komponen belanja daerah terdiri atas belanja hibah, belanja subsidi, belanja bunga, belanja modal, belanja barang dan jasa, belanja pegawai, belanja tidak terduga, dan belanja bantuan sosial. Meskipun mengalami perubahan klasifikasi, total belanja daerah kembali meningkat dari Rp1,33 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp1,44 triliun pada tahun 2023.

Peningkatan belanja daerah tersebut menunjukkan semakin menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, peningkatan belanja daerah yang tidak selalu diikuti dengan peningkatan pendapatan daerah yang seimbang dapat menyebabkan terjadinya tekanan fiskal dan defisit anggaran. (Rachman & Ningrum, 2025) menyatakan bahwa struktur pendapatan dan belanja daerah merupakan salah satu faktor yang memengaruhi terjadinya defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut tercermin pada Kota Cirebon yang mengalami defisit anggaran secara berturut-turut pada periode 2016–2019, yang menunjukkan bahwa kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah lebih besar dibandingkan kemampuan penerimaan daerah. Apabila kondisi tersebut terjadi secara terus-menerus, maka dapat meningkatkan risiko terjadinya ketidakseimbangan fiskal daerah.

Peningkatan belanja daerah yang terus terjadi menunjukkan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan Pemerintah Kota Cirebon dalam menjalankan fungsi pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah. Namun demikian, peningkatan belanja daerah yang tidak selalu diikuti dengan peningkatan kemampuan

pendapatan daerah dapat menyebabkan terjadinya tekanan fiskal dan ketidakseimbangan fiskal. Kondisi tersebut tercermin dari terjadinya defisit anggaran secara berturut-turut pada periode 2016–2019 yang menunjukkan bahwa kebutuhan pengeluaran pemerintah daerah lebih besar dibandingkan kemampuan penerimaan daerah. (Rachman & Ningrum, 2025)

Berdasarkan fenomena yang terjadi selama periode penelitian, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kota Cirebon dalam pengelolaan keuangan daerah. Pertama, terjadinya defisit anggaran secara berturut-turut pada periode 2016–2019 menunjukkan bahwa kemampuan penerimaan daerah belum sepenuhnya mampu mengimbangi kebutuhan pengeluaran daerah. Kedua, besarnya dana transfer pusat yang diterima Kota Cirebon menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih memiliki tingkat ketergantungan yang cukup tinggi terhadap pemerintah pusat dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Ketiga, dana transfer provinsi yang diterima Kota Cirebon menunjukkan kondisi yang berfluktuasi dari tahun ke tahun sehingga kemampuan fiskal daerah turut dipengaruhi oleh besarnya transfer yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Keempat, belanja daerah yang terus meningkat dari tahun ke tahun menunjukkan semakin besarnya kebutuhan pembiayaan daerah. Kondisi-kondisi tersebut mengindikasikan bahwa stabilitas fiskal Kota Cirebon masih menghadapi berbagai tantangan dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan fiskal apabila tidak diimbangi dengan pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan berkelanjutan.

Penelitian mengenai ketidakseimbangan fiskal telah banyak dilakukan sebelumnya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kondisi ketidakseimbangan fiskal dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti kapasitas fiskal daerah, transfer antar pemerintah, serta pengelolaan belanja daerah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana transfer dan peningkatan belanja daerah yang tidak diimbangi dengan kemampuan pendapatan daerah dapat menimbulkan tekanan terhadap kondisi fiskal daerah dan berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan fiskal.

Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada kapasitas fiskal, disiplin fiskal, maupun ketimpangan fiskal vertikal secara umum. Selain itu, objek penelitian yang digunakan umumnya mencakup pemerintah daerah secara agregat atau daerah tertentu dengan karakteristik yang berbeda. Penelitian yang secara khusus mengkaji pengaruh dana transfer pusat, dana transfer provinsi, dan belanja daerah terhadap ketidakseimbangan fiskal pada Pemerintah Kota Cirebon masih relatif terbatas.

Kebaruan (novelty) dalam penelitian ini terletak pada penggunaan dana transfer pusat, dana transfer provinsi, dan belanja daerah sebagai variabel independen untuk menganalisis ketidakseimbangan fiskal sebagai variabel dependen pada Pemerintah Kota Cirebon. Selain itu, penelitian ini menggunakan data time series selama periode 2012–2023 sehingga dapat memberikan gambaran mengenai dinamika kondisi fiskal daerah dalam jangka waktu yang lebih panjang. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris yang lebih spesifik mengenai faktor-faktor yang memengaruhi ketidakseimbangan fiskal di Kota Cirebon serta menjadi referensi dalam perumusan kebijakan pengelolaan keuangan daerah yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Berdasarkan fenomena terjadinya defisit anggaran secara berturut-turut pada periode 2016–2019, tingginya ketergantungan Pemerintah Kota Cirebon terhadap dana transfer pusat, fluktuasi dana transfer provinsi, serta meningkatnya kebutuhan belanja daerah dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa kondisi fiskal Kota Cirebon masih menghadapi berbagai tantangan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan keuangan daerah dalam menjaga keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran daerah belum sepenuhnya stabil sehingga berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan fiskal. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai pengaruh dana transfer pusat, dana transfer provinsi, dan belanja daerah terhadap ketidakseimbangan fiskal Kota Cirebon. Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“Pengaruh Dana Transfer, Belanja Daerah Terhadap Ketidakseimbangan Fiskal Kota Cirebon Tahun 2012–2023.”

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Kota Cirebon mengalami defisit APBD secara berturut-turut pada tahun 2016–2019 yang menunjukkan adanya tekanan fiskal dalam pengelolaan keuangan daerah.
- b. Dana Transfer Pusat yang diterima Pemerintah Kota Cirebon masih relatif besar sehingga menunjukkan tingkat ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat masih tinggi.
- c. Dana Transfer Provinsi yang diterima Pemerintah Kota Cirebon berfluktuasi dari tahun ke tahun sehingga dapat memengaruhi kemampuan fiskal daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik.
- d. Belanja Daerah Kota Cirebon cenderung meningkat dari tahun ke tahun, sementara peningkatan pendapatan daerah tidak selalu berjalan secara seimbang.
- e. Ketidakseimbangan antara penerimaan daerah dan pengeluaran daerah berpotensi menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan fiskal.
- f. Kemampuan Pemerintah Kota Cirebon dalam menjaga keseimbangan antara pendapatan daerah dan belanja daerah masih menghadapi berbagai tantangan.
- g. Belum diketahui secara pasti pengaruh Dana Transfer Pusat, Dana Transfer Provinsi, dan Belanja Daerah terhadap Ketidakseimbangan Fiskal Kota Cirebon periode 2012–2023.

2. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini difokuskan pada analisis pengaruh Dana Transfer Pusat, Dana Transfer Provinsi, dan Belanja Daerah terhadap Ketidakseimbangan Fiskal pada Pemerintah Kota Cirebon periode 2012–2023.
 - b. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dana Transfer Pusat (X1), Dana Transfer Provinsi (X2), dan Belanja Daerah (X3), sedangkan variabel dependen yang digunakan adalah Ketidakseimbangan Fiskal (Y).
 - c. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa Laporan Realisasi APBD Pemerintah Kota Cirebon periode 2012–2023.
 - d. Data penelitian diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPk) Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
 - e. Penelitian ini hanya membahas pengaruh Dana Transfer Pusat, Dana Transfer Provinsi, dan Belanja Daerah terhadap Ketidakseimbangan Fiskal tanpa memasukkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi kondisi fiskal daerah.
3. Rumusan Masalah
- a. Apakah Dana Transfer Pusat berpengaruh terhadap Ketidakseimbangan Fiskal Kota Cirebon Tahun 2012-2023 ?
 - b. Apakah Dana Transfer Provinsi berpengaruh terhadap Ketidakseimbangan Fiskal Kota Cirebon Tahun 2012-2023 ?
 - c. Apakah Belanja Daerah berpengaruh terhadap Ketidakseimbangan Fiskal Kota Cirebon Tahun 2012-2023 ?
 - d. Apakah Dana Transfer Pusat, Dana Transfer Provinsi, Belanja Daerah berpengaruh terhadap Ketidakseimbangan Fiskal Kota Cirebon Tahun 2012-2023 ?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pengaruh Dana Transfer Pusat terhadap Ketidakseimbangan Fiskal Kota Cirebon Tahun 2012-2023

- b. Untuk mengetahui pengaruh Dana Transfer Provinsi terhadap Ketidakseimbangan Fiskal Kota Cirebon Tahun 2012-2023
- c. Untuk mengetahui pengaruh Belanja Daerah terhadap Ketidakseimbangan Fiskal Kota Cirebon Tahun 2012-2023
- d. Untuk mengetahui pengaruh Dana Transfer Pusat, Dana Transfer Provinsi, Belanja Daerah terhadap Ketidakseimbangan Fiskal Kota Cirebon Tahun 2012-2023

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ekonomi publik dan keuangan daerah terkait pengaruh dana transfer pusat, dana transfer provinsi dan belanja daerah terhadap ketidakseimbangan fiskal.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur akademik mengenai pengelolaan fiskal daerah, khususnya yang berkaitan dengan ketidakseimbangan fiskal pemerintah daerah.
- 3) Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan keuangan daerah, transfer fiskal, dan pengelolaan anggaran pemerintah daerah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan, dan pemahaman penulis mengenai pengaruh dana transfer pusat, dana transfer provinsi dan belanja daerah terhadap ketidakseimbangan fiskal pada pemerintah daerah.

2) Bagi Pemerintah Kota Cirebon

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Cirebon dalam mengevaluasi pengelolaan dana transfer dan belanja daerah guna menciptakan stabilitas fiskal yang lebih baik serta meminimalisir terjadinya ketidakseimbangan fiskal.

3) Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis di masa yang akan datang, khususnya yang berkaitan dengan dana transfer, belanja daerah, dan ketidakseimbangan fiskal dalam konteks keuangan daerah.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi agar pembahasan dapat tersusun secara sistematis dan terarah. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi yang berjudul *“Pengaruh Dana Transfer, Belanja Daerah terhadap Ketidakseimbangan Fiskal Kota Cirebon Tahun 2012–2023”* disusun ke dalam beberapa bab sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini membahas mengenai landasan teori yang berkaitan dengan dana transfer pusat, dana transfer provinsi, belanja daerah, dan ketidakseimbangan fiskal, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, serta pengembangan hipotesis penelitian.

Bab III Metode Penelitian

Pada bab ini membahas mengenai metode penelitian yang digunakan, meliputi objek penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, definisi operasional variabel, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi mengenai deskripsi objek penelitian, hasil pengolahan data, analisis hasil penelitian, serta pembahasan mengenai pengaruh dana transfer pusat, dana transfer provinsi dan belanja daerah terhadap ketidakseimbangan fiskal Kota Cirebon.

Bab V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan serta saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian untuk pihak terkait maupun penelitian selanjutnya.

